

Otoritas Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Menatap Otonomi Desa dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan dan Ekologi Politik¹

oleh:

Dr. Arya Hadi Dharmawan

Peneliti sekaligus Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB,
Ketua Pengelola Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Dept. KPM IPB dan Staf Pengajar pada Program Studi
Sosiologi Pedesaan Sekolah Pasca Sarjana IPB
email: adharna1963@yahoo.com

1. Latar Belakang: Desa dalam Pusaran Kekuatan TNCs, TNSs, dan TNKs

Tidak mudah membayangkan seperti apakah wujud desa dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di Indonesia pada 2030 (23 tahun ke depan) nanti. Berbagai spekulasi yang didasarkan oleh kondisi faktual dan prediksi kecenderungan global telah dimulai sejak lama oleh para ahli termasuk kalangan *political ecologists* untuk bisa meraba “bangun struktur sosial dan politik serta nilai-nilai budaya” desa masa depan di kawasan negara dunia ketiga (termasuk Indonesia). Dikatakan sebagai “bukan hal yang mudah” untuk menggambarkan desa masa depan, karena proses-proses transformasi sosial di kawasan pedesaan (loklaitas) berjalan amat-sangat cepat dan membawa konsekuensi perubahan sangat substansial pada setiap aspek kehidupan lokal (lihat Castels, 2001).

Desa (lokalitas) juga menjadi ajang perebutan tarik-menarik kepentingan sosial-politik dan ekonomi yang menjadikan eksistensinya tidak selalu bebas dalam menentukan arah perkembangannya ke depan. Tesis tentang beradunya *the strong state* dan *the weak state* dalam teori “*global-national dualism*” pada arena pertarungan kekuatan global sangat jelas akan menyeret desa dalam arus kuat politik pengaturan SDA yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat kedaulatannya dalam menata kehidupan entitas sosial yang diayominya (lihat Robinson, 2001). Dari perspektif *world-system theory*, Friedman (1999) bahkan dengan sangat tandas menyatakan bahwa gejala artikulasi (perebutan kekuatan) sistem-sistem pengaturan dimana sistem sosial lokalitas yang diwakili oleh *indigenous civilization* terus didesak oleh kekuatan *western-global world* yang sangat menekan. Tekanan tersebut berlangsung melalui ekspansi-ekspansi “sistem pengetahuan Barat” (yang mendesak sistem pengetahuan tempatan), “nilai-budaya modernitas ala Eropa Barat” (yang menggusur cara hidup khas-lokalistik), serta “sistem-ekonomi kapitalisme” yang melaju seiring dengan perluasan kapital dari *Trans-National Corporations (TNCs)* yang mendesak perekonomian lokal (lihat Escobar, 1998, 1999; 2005 lihat juga Tabel 1 pada Lampiran).

Robinson (2001) mengemukakan lebih jauh bahwa kapitalisme menyebabkan kelumpuhan total kawasan perifer melalui dua cara, yaitu *ekspansi kolonialisme* di era penjajahan (abad 16-19) dan *ekspansi globalisme* di era modernisme (abad 20-21), sebagaimana dikemukakan:

“the capitalist system since its inception has been expanding in two directions, extensively and intensively. The final phase of capitalism’s extensive enlargement started with the wave of colonization of the late nineteen and early twentieth century and concluded in the 1990s with the reincorporation of the former Soviet Bloc and Third World revolutionary countries. Under globalization, the system is undergoing a dramatic intensive expansion. Globalization is creating uneven spaces that support material basis for human societies and is changing the whole instittutional organizations array”

¹ Makalah pemicu diskusi, disampaikan pada “Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030” diselenggarakan oleh PKSPL, PSP3IPB dan P4W LPPM IPB, dilaksanakan di Kampus Manajemen Bisnis IPB Gunung Gede, Bogor 9-10 Mei 2007.

Hasil akhir dari bekerjanya sistem-sistem pengaturan *ala* kapitalisme dan globalisme adalah apa yang dikonseptualisasikan sebagai pengaturan-pengaturan berbasis kesepahaman antar bangsa (antar-negara). Kesepakatan antar negara-bangsa itu dalam konteks globalisme dikenal sebagai konsep *Trans-National States* (TNSs). Teladan yang sangat sederhana dalam hal ini adalah kesepakatan Indonesia dengan USA atas eksploitasi bahan tambang bernilai ekonomi tinggi (minyak, emas, tembaga). Kesepakatan tersebut seterusnya memandatkan kepada TNCs untuk menggarap sumberdaya alam di berbagai lokalitas di Indonesia tanpa harus mengindahkan eksistensi komunitas lokal untuk berperanserta. Dalam konsep TNSs yang demikian itu, kedaulatan lokal *terkooptasi dan terkolonisasi (terjajah)* oleh kekuatan politik-ekonomi antar-negara yang berjejaringan secara trans-nationalitas. Dalam aliansi yang demikian itu, keputusan-keputusan yang dihasilkannya seringkali sangat merugikan eksistensi lokal. Oleh karena itu, konflik-konflik sumberdaya alam yang muncul di berbagai daerah adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kekuatan kolonisasi *ala* globalisme menempatkan TNCs bekerja (menekan) dengan pasti di wilayah-wilayah ***kedaulatan perekonomian*** suatu lokalitas (desa). Dalam pada itu, TNSs lebih bekerja pada wilayah-wilayah ***kedaulatan kekuasaan-politik-pengaturan*** suatu sistem sosial, dimana “tangan-tangan birokrasi negara” bekerja dengan cermat dan seksama demi kepentingan TNSs (dan TNCs). Fakta inilah yang kemudian dalam sosiologi pembangunan dikatakan sebagai proses-proses deterritorialisasi struktur dan budaya lokal. Dengan kata lain, hal itu dapat diklaim sebagai proses-proses ***pelucutan kedaulatan komunitas lokal*** untuk hidup mandiri tanpa penjajahan dari berbagai agensi ekstra-lokal (kelembagaan non-lokal dan agensi asing).

Castels (2001) mengemukakan dalam hal ini, bahwa ekspansi globalisme (***trans-nationalism theory***) yang menghempaskan sistem sosio-kemasyarakatan lokal adalah prasyarat-penting (dan tidak terelakkan) bagi terbentuknya “*world modern social system*” sejak keseluruhan skenario pembangunan kawasan negara dunia ketiga terperangkap dalam ***modernization-theory***. Ditambahkan pula bahwa sejajar dengan terbentuknya sistem sosial dunia modern, penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang berjalan dalam logika kapitalisme (dicirikan oleh sifat-sifat: hegemonik, rakus, serba investasi asing, perilaku eksploitatif terhadap alam, *growth-mania*, *selfish*, mengabaikan kesejahteraan kolektif), membentuk “*world economic imperium*”. Artinya, modernisme Barat dan kapitalisme global memberikan peluang yang makin sedikit dan terbatas bagi sistem sosio-ekonomi lokal untuk bertahan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“The evolution of social scientific knowledge has been largely based on the principles needed for construction and integration of the western nation-state... Furthermore, western scientific knowledge provides the basis for modernization process necessary to support third world economic development to run. It forms global economic expansion and socio-political hegemony ...resulting in the formation of integrated world economic and social system of the globe” (disarikan dari Castels, 2001)

Dalam kerangka ini, maka globalisme selain diartikan sebagai integrasi ekonomi dan sistem sosial global, secara tidak dapat dihindarkan konsep tersebut mengangkut pula gagasan tentang adanya penetrasi budaya *Trans-National Knowledge System* (TNKs) secara sistematis di seluruh penjuru dunia. Penetrasi TNK sebagai bagian dari keniscayaan modernisasi dan kapitalisme global ikut menggerogoti ***kedaulatan*** lokal terutama di ***wilayah spiritualitas dan budaya***. Dalam hal ini, nilai-nilai kebajikan lokal (*local virtues*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) secara sistematis dipinggirkan oleh pengetahuan Barat yang mendominasi (*Western knowledge system*) dan datang bersama-sama dengan kekuatan kapital-global (Escobar, 1998; 1999, Nygren, 1999). Lebih jauh Friedman (1999) mengemukakan bahwa untuk keluar dari kekuatan hegemonik TNSs dan TNCs dan arus-arus pikiran *Eurocentrism* (TNKs) yang menekan itu, maka diperlukan adanya perubahan radikal berpendekatan “strukturalisme-pembebasan” terhadap komunitas lokal (desa). Strategi “***reteritorialisasi kedaulatan lokal***” dalam hal ini dipandang dapat berfungsi

sebagai penawar proses-proses **deteritorialisasi** sistem sosial-ekonomi dan budaya lokalitas akibat globalisme. Strategi tersebut berpusat pada keunggulan lokal dan menjadi satu-satunya pilihan-solusi dari “mazhab kekuasaan” bagi sistem lokal untuk keluar dari kolonisasi TNCs, TNKs, dan TNSs. Hanya dengan pendekatan reteritorialisasi (“kembali berdaulat”) itulah, sistem-sistem lokal dapat tertolong dari pusaran-pusaran kekuasaan yang sangat mematikan di masa kini dan mendatang, sebagaimana dikatakan oleh Friedman (1999):

“They have been marginalized in their own territories, boxed, packaged and oppressed, sometimes even unto death. But this has changed in many parts of the world, because the indigenous is now part of a larger inversion of Western cosmology in which the traditional other, a modern category, is no longer the starting point of a long and positive evolution of civilization, but a voice of Wisdom, a way of life in tune with nature, a culture in harmony, a *gemeinschaft*, that we have all but lost. Evolution has become devolution, the fall of civilized man. But there is a social reality to this change as well, since the voices of the Other are the voices of real people struggling for control over their conditions of existence. This struggle is not about culture as such, but about social identity of a particular kind, indigenous identity, which is constituted around cultural and experiential continuities that are only poorly mirrored in Western categories, not least in anthropological categories.”

Kasus-kasus marjinalisasi teritorial *sistem-sistem peradaban asli* oleh kekuatan Barat, sebagaimana yang terjadi di desa-desa asli “*Ngata Toro*” di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah atau “*Suku Anak Dalam*” di Jambi, adalah teladan-teladan yang representatif dan sangat tepat untuk menggambarkan proses-proses keterdesakan lokal oleh globalisme-modernisme-kapitalisme ala Eropa di Indonesia. Penderitaan (dan perasaan terkolonisasi) yang dialami oleh *alam dan masyarakat lokal* telah mendorong sebuah upaya konstruktif untuk memformulasikan gagasan ke arah perubahan cara-pandang dalam mengentaskan ketidakberdayaan dan menguatkan *local-cultural-entity survival capacity* di masa depan (lihat Nainggolan, 2007).

Keseluruhan perspektif keterdesakan lokal oleh kekuatan global di atas, diformulasikan dengan baik oleh Fukuyama (2004) menjadi sebuah teoretisasi yang dikenal sebagai “*the theory of sovereignty erosion*”. Teori ini menjelaskan betapa kedaulatan-kedaulatan lokal dalam pengaturan di segala tatanan kehidupan tererosi secara dramatis oleh mekanisme-mekanisme pengaturan sosial-ekonomi-politik Barat/global. Teori ini lebih khusus menjelaskan ketidakberdayaan tata-pemerintahan lokalitas dalam mengatur sumberdaya alam di kawasan tempatan. Struktur-struktur kelembagaan yang memiliki otoritas asli dalam pengaturan sumberdaya alam mengalami gerusan terus-menerus dan dengan kekuatan sangat luar biasa oleh proses-proses *homogenisasi tatanan pemerintahan* ala Barat yang menghancurkan sistem tata-pengaturan lokal.

Dalam kerangka teori erosi kedaulatan dari Fukuyama, proses-proses peluruhan kekuatan organisasi sosial pengaturan asli (terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDA) menjadi bagian yang paling sulit untuk dihindarkan. Proses penggerusan kedaulatan lokal atas SDA yang dimiliki/dikuasai itu datang bergelombang seiring dengan proses-proses modernisasi-westernisasi struktur sosial dan budaya yang dibawa dan diimplementasikan secara massif oleh pemerintah (Negara) di kawasan pedesaan. Dalam hal ini, Castels (2001) mengatakan sebagai berikut:

“As transnational linkages pervade all areas of social life, national boundaries become more porous and local autonomy declines; communities and regions become increasingly interconnected and mutually dependent.”

Escobar (2005) dengan menggunakan kerangka filosofi Foucauldian mengatakan bahwa rejim pengaturan lokal (pemerintah desa) tidak mampu lagi berkuasa dan berwenang dalam pengaturan SDA yang dimilikinya sendiri. Hal ini dikarenakan, cara-berpikir dan ideologi lokal yang dianut oleh para pemegang otoritas lokal (kepala desa dan tokoh desa yang diikuti oleh warga) secara “sengaja atau tidak-sengaja” telah larut-mengikuti logika-rasionalitas atau

cara-berpikir yang dianut oleh agensi ekstra-lokal (TNCs dan TNSs). Kooptasi (penjajahan) budaya itu merasuki *ruang-ruang pemikiran* melalui proses-proses sosialisasi yang dilakukan oleh kekuatan negara. Kekuatan kolonialisme pemikiran ini pula yang melumpuhkan struktur-struktur sosial lokal tidak mampu mengambil inisiatif perlawanan.

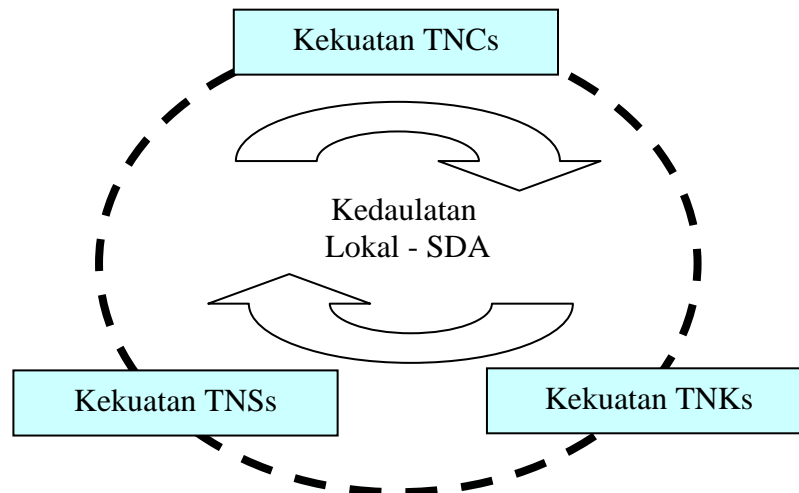
Disebutkan pula oleh Escobar bahwa *rejim pembangunanisme* yang berjalan menurut “logika” teori modernisasi dianggap telah menjadi **kekuatan kolonialisme baru** tidak saja sebagai *powerful mechanism for production and economic management* (TNCs) namun, lokalitas juga telah menjadi obyek-obyek baru penetrasi ilmu-pengetahuan ala *Western* (TNKs). Penetrasi cara-berpikir (yang serba pertumbuhan, serba investasi asing, serba akumulasi ekonomi dan serba ekspansi-kapital) itulah yang selanjutnya kelak menghasilkan dominasi-dominasi budaya dalam cara berpikir yang melenggangkan dan melenggangkan dominasi kekuasaan-kekuasaan politik lokal *ala* kelembagaan kapitalistik Barat (pada tatanan pengaturan lokal). Penetrasi sistem pengetahuan Barat yang sangat *Euro-centrism* terhadap *indigenous knowledge* melalui kekuatan TNKs sangat mempengaruhi (*depressing-effect*) keberdayaan pengaturan lokal (lihat Silitoe, 1998; Nygren, 1999). Ketidakberdayaan struktur kelembagaan lokal (pemuka adat, aturan adat, hukum adat) dalam mengatur dan bernegosiasi dengan kekuatan luar, adalah keprihatinan besar yang sangat mengancam eksistensi lokalitas.

Dalam kerangka Foucauldian pula, dijelaskan bahwa otoritas lokalitas di banyak kawasan dunia ketiga menyerah pasrah dan menjadi tidak berdaulat (**authority-loss**) lagi atas SDA. Kehilangan kedaulatan ini jelas mengubah *the whole landscape of livelihood system* secara totalitas sehingga struktur nafkah lokal (pedesaan) menjadi sangat mengenaskan. Teladan yang sangat baik diberikan pada fakta ketidakmampuan desa/lokalitas menghasilkan pangan dan kesejahteraan dari SDA yang ada bagi warga masyarakatnya sendiri. Contoh ekstrem terjadi di kawasan Sub-Sahara Afrika dan kawasan eks-sejarah kolonialisme Eropa di Asia pada abad 16-19 (lihat Bebbington and Batterbury, 2001) dimana seluruh SDA dikuras tanpa menyisakan apapun bagi warga lokal. Apakah fakta ini masih terjadi di Indonesia saat ini? Jawabannya: “ya”, di Timika Papua, di Kalimantan Timur, di pedalaman Sumatera, di kawasan Pantura Jawa, dan sebagainya.

Dalam hal ini Escobar (1998, 1999) memperkenalkan konsep TIGA-ALAM untuk melihat kekalahan sistem pengaturan SDA lokal. Ketiga alam itu adalah: “*alam-organik*” (sistem alam yang dipelihara oleh komunitas lokal) yang menjadi domain kekuatan lokalitas dalam rejim tata-kelola SDA. Kedua, “*alam kapitalis*” yaitu sistem alam atau SDA yang dikolonisasi oleh kekuatan kapitalisme, dan ketiga adalah “*alam-teknologis*” yaitu sistem alam yang dikuasai oleh pemilik teknologi maju-Barat. Dalam konsepsi Escobar, hanya alam organiklah yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan lokal. Kedua alam lainnya berada di domain tata-kelola SDA ala modernitas-Barat yang sarat dengan muatan kepentingan **global-transnasionalisme**. Dalam studi yang komprehensif, Kuswijayanti *et. al.* (2007) membuktikan fakta kehilangan kedaulatan lokal pada pengelolaan SDA tersebut di kawasan konservasi taman nasional Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dimana masyarakat lokal tak lagi berkuasa atas SDA yang diwarisinya sebagai konsekuensi proses-proses kapitalisasi SDA di wilayahnya. Marjinalisasi komunitas lokal dalam pemanfaatan SDA di wilayah tempatan menjadikan mereka justru terjebak sebagai “entitas terjajah” di tanah mereka sendiri (lihat Gambar 1).

Dari gambaran empirik di atas, sangat tampak jelas bahwa lokalitas (desa) sebagai *social-container* struktur dan budaya lokal serta memiliki kekhasan pengaturan SDA menghadapi kerentanan yang luar-biasa saat mereka harus menghadapi globalisme kapital, *global knowledge system* dan konspirasi antar-negara yang mengepung dari segala sudut perhatian. Kerentanan tersebut bisa berakibat sangat fatal dan menjelma ke dalam dua bentuk dilema, yaitu: (1) dilema ketergantungan (ketergantungan sumber nafkah, informasi, budaya); dan (2) dilema kehilangan identitas budaya lokal melalui mekanisme pelumpuhan struktur-struktur

lokal atau peleburan identitas kelembagaan lokal kepada identitas global yang sangat dominan.



Gambar 1. Pusaran Tiga Kekuatan yang Memengaruhi Kedaulatan Lokal dalam Pengaturan dan Pemanfaatan SDA di Negara Sedang Berkembang

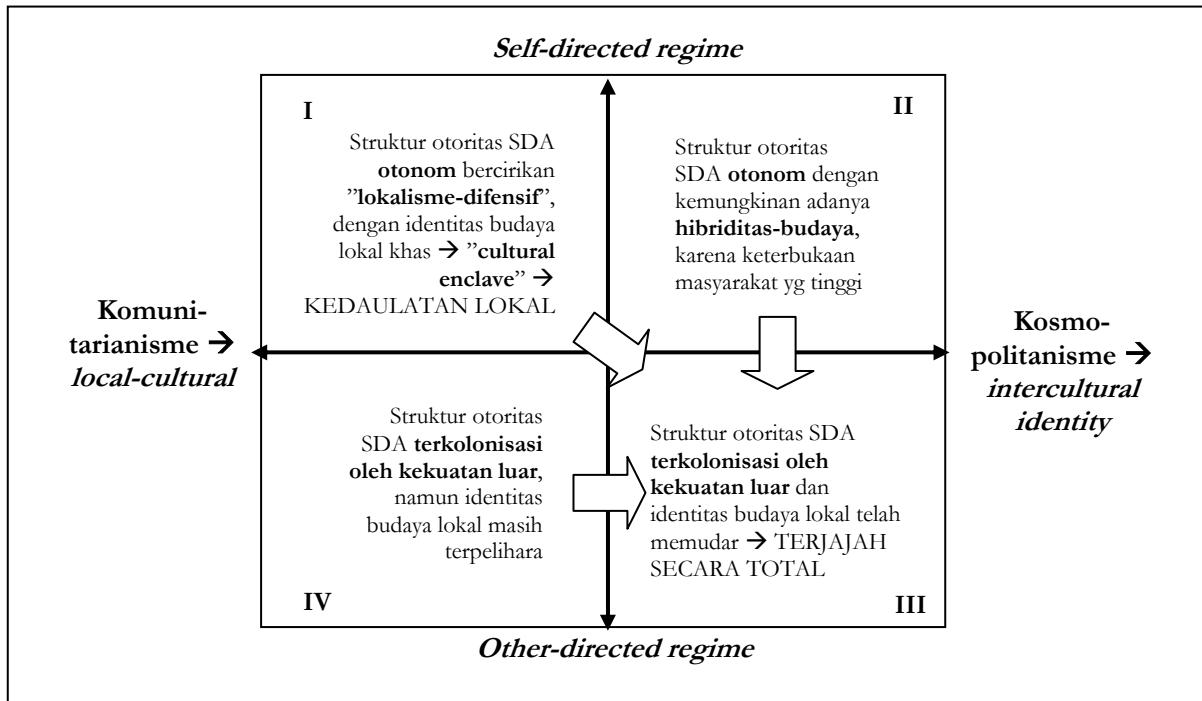
Dengan realitas-dan-fakta di atas, otoritas lokal dalam pengelolaan SDA sebenarnya telah benar-benar terjebak-kuat dalam pusaran tiga arus globalisme yang sangat melumpuhkan, mematikan dan meleburkan identitas mereka, yaitu: TNCs, TNS, dan TNKs. Penetrasi ketiga kekuatan melalui “pendekatan damai” yang dibungkus oleh aktivitas-aktivitas pembangunanisme via pemerintah (negara) telah membuat kesulitan tersendiri bagi desa (lokalitas) untuk bisa memposisikan diri dan bergerak dengan leluasa dalam menentukan “nasibnya” secara mandiri. Pendekatan yang sedikit agak kasar ditempuh oleh kapitalisme global melalui penetrasi pasar internasional yang langsung menembus ke lokalitas serta melalui proses-proses komodifikasi dan kapitalisasi SDA yang mengubah keseluruhan tatanan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan pedesaan. Pertanyaannya kemudian adalah: jalan yang arif dan bijaksanan seperti apakah yang sepantasnya ditempuh agar, desa sebagai lokalitas memiliki pilihan yang terbaik untuk keluar dari “jebakan eksploitasi SDA yang mematikan” ini? Bagaimana pula seharusnya bentuk desa (lokalitas) di masa depan (tahun 2030) seharusnya dikembangkan? Pilihan strategi apa yang harus ditempuh oleh desa (lokalitas) dalam hal pusaran globalisme terlalu kuat untuk dapat dihindarkan begitu saja?

2. Empat Skenario Sistem Pengelolaan SDA Lokal: Memberikan Kesempatan Bagi Lokalitas (Desa) untuk Memilih

Dengan tetap berasumsi pada bekerjanya tiga pusaran arus globalisme yang menghempas desa atau lokalitas, maka dapat disusun teoretisasi tentang pengelolaan SDA oleh komunitas lokal (tempatan) di masa depan. Teoretisasi tersebut mengacu pada kerangka pemikiran Friedman (1999) yang mengemukakan bahwa kecenderungan global menawarkan dua ranah pemikiran tentang “**identitas struktur kekuasaan**” di wilayah kekuasaan pengaturan dan “**identitas budaya tempatan**” di wilayah sistem sosio-budaya lokal.

Dalam teoretisasi Friedman (1999), ranah identitas struktur kekuasaan mengenal dua kutub yang saling berseberangan, yaitu “*self-directed regime*” (kedaulatan lokal) di satu kutub dan “*other directed regime*” (keterjajahan oleh kekuatan asing) di kutub yang lain. Kedua kutub dihubungkan oleh *continuum of identity* dimana di antara keduanya ditemukan variasi-variasi identitas struktur kekuasaan dan otoritas turunannya. Sementara itu dikenal pula dua kutub lain dalam ranah identitas sistem budaya, yaitu kutub “*kosmopolitanisme*” (keterbukaan total)

yang bercirikan inter-dan-multikulturalisme di satu sisi, dan kutub “*komunitarianisme*” (ketertutupan budaya total) yang bercirikan identitas kultural “*enclave*” (ciri-budaya sangat homogen) di sisi lainnya. Kedua kutub membangun *identity of culture continuum* yang di antara kedua kutub dapat ditemukan variasi-variasi identitas budaya turunannya. Apabila dua garis-kontinum yang dibangun oleh kutub-kutub identitas struktur dan kutub-kutub identitas budaya saling disilangkan secara tegak lurus, maka diperoleh sebuah matriks dengan 4 (empat) kuadran (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Empat Ruang Ekstrem Sistem Budaya dan Otoritas Pengelolaan SDA Lokal

Dengan menerapkan pemikiran Friedman (Gambar 2) dapat diperoleh empat kombinasi ekstrem tata-kelola SDA maupun identitas ekstrem pengembangan sistem pengetahuan dan nilai budaya lokal. Ruang-ruang tata-pengaturan SDA tersebut adalah:

- (1) Ruang ekstrem I (“kiri-atas”), adalah ruang dimana pengelolaan SDA mengandalkan struktur-struktur kelembagaan dan aturan-aturan lokal yang sangat-otonom sifatnya. Segala kekuatan asing (TNCs, TNKs, maupun TNSs) tidak dapat menembus isolasi ruang I sehingga struktur otoritas pengelola SDA berkesan bercirikan “*lokalisme defensif*” (Winter, 2003). Nilai budaya dan sistem pengetahuan lokal yang kuat membuat sistem tata-kelola SDA sangat berciri lokal, sehingga membentuk sebuah ***enclave sistem budaya*** yang sangat khas. Ruang I ini biasanya didapati pada sistem sosial-masyarakat-adat yang masih sangat kuat memegang sistem pengaturan SDA dan tradisi asli (“terisolasi”). Ruang ini dimiliki oleh komunitas di kawasan-kawasan pedalaman dimana penetrasi globalisme tidak cukup kuat untuk menembus *structural and cultural barrier* yang selama ini telah terpasang dengan baik disana. Di ruang inilah ditemukan ***kedaulatan lokal*** atau ***otonomi lokal*** dalam arti yang sesungguhnya (contoh sangat baik diberikan oleh: “Suku **Anak Dalam** di Jambi” atau “Komunitas **Baduy** di Banten” dan “Sistem **Pakraman** serta **Subak**” di seluruh pulau Bali). Pertanyaannya kemudian adalah: seberapa lama “keterisolasian-dan-ketahanan struktur serta budaya” ini akan terus bertahan dan tegar menghadapi datangnya kekuatan bertubi-tubi dari TNCs, TNSs, dan TNKs setiap saat?

- (2) Ruang ekstrem II (“kanan-atas”) adalah ruang dimana kedaulatan lokal atau otonomi lokal hanya terjadi dalam hal olah-otoritas pengelolaan SDA saja. Hingga taraf tertentu TNCs dan TNSs tidak mampu mengubah tatanan pengelolaan SDA lokal. Namun, sifat keterbukaan masyarakat dan tiadanya filter budaya yang kuat (bersifat kosmopolit atau permisif terhadap nilai-nilai asing) telah menyebabkan *inter-cultural-influx* mengalir masuk dengan kekuatan cukup tinggi di ruang ini. Derasnya arus keterbukaan memberikan akses yang sangat besar bagi masuknya sistem-sistem pengetahuan, ideologi dan tata-nilai budaya asing (TNKs) ke kawasan lokal. Intrusi TNKs yang terus-menerus, hingga taraf tertentu mampu melumpuhkan sistem budaya lokal sehingga menghasilkan *hibriditas budaya* pada masyarakat tempatan. Contoh yang sangat baik dalam hal ini diberikan oleh: “Komunitas **Dayak** dengan sistem Ketemenggungan yang terjaga di Kalimantan Barat”, namun dengan tata-nilai budaya yang mulai memudar. “Tata-pengaturan **Nagari** di Ranah Minang” adalah contoh kedaulatan pengaturan lokal dalam pengelolaan SDA dimana struktur-struktur lokal masih sangat berdaya, namun orientasi nilai masyarakatnya telah mulai terbelah-belah ke berbagai paham yang saling berbeda arah. Pertanyaannya: Bilakah arus-tekanan TNKs yang terus-menerus dalam membangun hibriditas budaya akan mampu menembus sendi-sendi kelembagaan lokal? Bilakah penetrasi budaya ini akan berlanjut dan mengubah keseluruhan lanskap struktur kelembagaan atau tata-pengelolaan SDA lokal?
- (3) Ruang ekstrem III (“kanan bawah”) adalah ruang dimana modernitas-Barat yang dibawa oleh gerakan modernisasi (termasuk modernisasi pemerintahan lokal) via berbagai kegiatan pembangunan (kerjasama TNCs dan TNSs), telah mampu mengubah struktur-struktur atau tatanan-kelembagaan pengelolaan SDA lokal. Otoritas asli pengelola SDA lokal tidak lagi mampu dan berdaya (lumpuh dan terdistorsi) sehingga digantikan secara totalitas oleh struktur pengelolaan SDA bentukan dari luar (misal: HPH, Perusahaan pertambangan swasta, perkebunan besar, pertambangan asing, dsb). Selain itu, sifat masyarakat yang permisif (kosmopolit) ditambah dengan tidak bekerjanya filter-filter budaya secara sempurna, telah menyebabkan rusaknya sistem budaya lokal. Dengan kehancuran ini, maka dengan sangat mudahnya TNKs membangun hibriditas-budaya di masyarakat tempatan. Pada ruang ekstrem ini didapati struktur *tata-pengaturan SDA dan orientasi nilai budaya yang terjajah* secara sempurna. Contoh yang sangat baik dalam hal ini diberikan, oleh **desa-desa di Jawa** yang tidak lagi memiliki otoritas memadai dalam pengelolaan SDA. Sementara itu, mereka pun tidak lagi memiliki ciri-budaya yang bisa diagungkan. Pertanyaannya: akankah semua desa (lokalitas) di seluruh Indonesia mengikuti “*sad story*” yang telah dialami oleh desa-desa di Jawa?
- (4) Ruang ekstrem IV (“kiri bawah”) adalah ruang dimana kelembagaan bentukan pengelolaan SDA (akibat kekuatan proses-proses modernisasi-kapitalisasi oleh TNCs dan TNSs) telah mengubah lanskap kelembagaan pengaturan SDA di wilayah tempatan. Komunitas lokal dan tata-pengaturan SDA lokal tidak berdaya menghadapi tekanan TNCs dan TNSs, sehingga sistem pengelolaan SDA secara keseluruhan mengikuti cara-cara yang diintroduksikan dari luar sistem sosial lokal. Namun, di ruangan ini filter-filter budaya masih terjaga dengan baik, sehingga orientasi nilai budaya tempatan (lokal) masih dapat operasional bagi komunitas lokal. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa struktur pengelolaan SDA telah *terkolonisasi oleh struktur dan mekanisme bentukan* dari luar. Sementara itu kekuatan komunitarianisme masih mampu menahan laju tekanan TNKs. Contoh yang agak mendekati situasi ini diberikan oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di DIY dan Jawa Tengah dengan tokoh sentralnya “**Mbah Marijan**”. Contoh lain adalah komunitas di **Ngata Toro** di Sulawesi Tengah yang mampu mempertahankan cara-cara dalam membina kehidupan sosio-kemasyarakatannya menurut budaya asli (*strategi koeksistensi kultural*), sekalipun

kawasannya telah terkooptasi oleh struktur-struktur asing. Penetrasi kekuasaan pengelolaan SDA datang bersama-sama dengan “program konservasi SDA” yang didatangkan oleh negara. Program tersebut dianggap “memperdaya masyarakat lokal” karena belakangan disadari adanya “penunggang bebas” yang mendompleng program tersebut (perusahaan HPH) yang menghabiskan hutan di Ngata Toro berdalih bekerja di zona pemanfaatan konservasi SDA. Komunitas Ngata Toro samasekali tidak berdaya melawan aliansi “Negara dan Swasta” yang bahu-membahu mengurus SDA mereka. Pertanyaannya: Bilakah struktur-struktur pengelolaan SDA bentukan mampu mengubah rona kebudayaan lokal? Datangnya kekuatan kapitalisme ke wilayah lokal jelas membawa pengaruh penting bagi warga dalam ruang pemikiran mereka. Cara mereka memaknai sesuatu hal (termasuk di ruang materi) jelas akan mengubah lanskap budaya lokal. Namun, tidak dapat diketahui seberapa cepat dan seberapa dalam “kerusakan budaya” akan berlangsung di wilayah tersebut.

Dengan dibantu oleh peta dari keempat ruang pengelolaan SDA dan peta budaya lokal dalam pemanfaatan SDA sebagaimana skenarionya terpaparkan pada Gambar 2, maka dapat diprediksi arah perkembangan *kedaulatan struktur lokal* dan *ketahanan budaya lokal* dalam pengelolaan SDA di Indonesia tahun 2030.

Terdapat empat skenario kemungkinan dan ratusan kemungkinan lainnya yang dapat diturunkan secara variatif oleh keempat ruangan di atas. Namun prediksi paling kuat menunjuk pada skenario tunggal yaitu terbentuknya **pola ekstrem di ruangan III**. Ruangan ini diisi oleh **lokalitas-lokalitas yang tidak lagi berdaulat dalam pengelolaan SDA** dan lokalitas-lokalitas yang **tidak lagi memiliki ciri-budaya lokal** yang khas. Semua menuju ketunggalan sistem tata-pengaturan dan budaya pemanfaatan SDA (ala Jawa yang terbukti sangat terkolonisasi).

Terlebih jika semua fasilitas peraturan dan perundangan yang dihasilkan secara nasional memberikan jalan masuk yang leluasa bagi terciptanya ruang III tersebut. Sebut saja *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (UU 32/2004), dan UU teknis lainnya seperti *UU Penanaman Modal* yang baru dimana pemodal dapat menguasai tanah melalui HGU hingga 95 tahun lamanya. Sebagian besar isi UU tersebut kurang memberikan ruang yang leluasa bagi lokalitas (desa) untuk berdaulat di tempat/ruang dimana mereka membina kehidupan sejati. Dengan kata lain, materi UU memang sengaja dijebak dalam rasionalitas dan logika kapitalisme agar TNCs, TNSs, dan TNKs “nyaman dalam bekerja hingga di tingkat lokal”, sehingga keseluruhan sistem sosial dan orientasi nilai budaya lokal terkolonisasi dan takluk mengikuti logika globalisme secara utuh. Pertanyaannya: haruskah skenario ruang III ini yang ditempuh oleh Indonesia dalam membangun desa 2030?

Jika jawabannya ya, maka tidak ada lagi langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Mengapa karena semua proses-proses pembangunan telah memberikan platform yang cukup dan memadai untuk mengarah ke skenario ruang III. Namun jika jawabannya “tidak”, maka kini tersisa tiga pertanyaan yang mengemuka:

- (1) Bagaimana caranya melepaskan lokalitas (desa) dari totalitas ketergantungan global? Bagaimana menemukan kembali kedaulatan lokal dalam pengelolaan SDA, yang selama ini terbukti mampu membangun dan menjamin *local livelihood system* (sistem nafkah) yang memadai dan lestari bagi warga lokal, namun kini telah banyak yang hilang itu?
- (2) Apakah skenario koeksistensi (kesejajaran struktur dan budaya) tanpa harus disertai proses-proses dominasi dapat ditempuh untuk mempertahankan kedaulatan lokal dalam pengelolaan SDA disamping kekuatan globalisme (TNCs, TNSs, TNKs) yang terus juga hadir?

- (3) Ataukah diperlukan ruang yang memungkinkan terjadinya “hibriditas struktur dan budaya” pengelolaan SDA dimana ciri-budaya dan struktur pengelolaan SDA benar-benar *distinct* dari ciri globalisme maupun lokalisme?

Pertanyaan berikutnya, siapakah yang berhak dan bersedia menyediakan jawaban bagi keseluruhan tantangan di atas? Haruskah negara, swasta, dan masyarakat sipil mengambil inisiatif secara terpisah-pisah? Ataukah kekuatan sinergisitas yang didasari oleh sikap saling menghormati teritorial masing dalam kerangka kemitraan sejajar, yang akan bekerja memperjuangkan solusi atas jawaban-jawaban pertanyaan di atas? Proses-proses sosial di ruang-ruang kehidupan manakah yang harus dilibatkan demi mencari solusi atas pertanyaan-pertanyaan di atas? Apakah ruang hukum perundangan saja mencukupi? Ataukah perlu ruang politik ikut membenahinya? Atau ruang ekonomi memerlukan semangat dan mazhab praktek perekonomian baru yang khas untuk Indonesia?

3 Penutup

Tulisan pendek ini ditutup dengan mengajukan posisi akademik tentang perlunya penyelesaian di ruang hukum, politik, budaya-pendidikan, dan ekonomi untuk membantu pengelolaan SDA di aras lokalitas (desa) yang lestari. Dalam hal ini dirasakan perlu usaha untuk melakukan *political reorganization of natural resources management system* dimana kedaulatan lokal diperhatikan demi keberlanjutan lokalitas (desa) dengan ciri budaya yang lebih dihormati, berdaulat, serta struktur-kelembagaan pengelolaan SDA yang kokoh dan *legitimate* dalam mengelola dan menghidupi warga komunitas lokalnya sendiri. Teori ketergantungan-pembangunan (*dependency theory*) telah banyak membuktikan fakta-empirik dengan absah, bahwa semakin tergantung sebuah sistem sosial lokal pada struktur-struktur eksternal-global, maka semakin terhisaplah keseluruhan sumberdaya kehidupan (*livelihood resources*) yang tersedia di dalam lokalitas tersebut (*the rural-leakages scenario*) ke pusat-pusat ekonomi global. Dengan demikian, jika komunitas asli (lokal) hendak keluar dari skenario kebocoran, pusaran, dan keterjajahan (kolonisasi) sumberdaya lokal oleh kekuatan global, maka struktur-struktur ketergantungan harus dihindari. Contoh terbaik diberikan pada cara-cara pengelolaan SDA yang telah dipraktekkan oleh lokalitas-lokalitas asli di seluruh pelosok nusantara. Persoalannya, membiarkan komunitas tempatan di tiap-tiap lokalitas (desa) yang “berdaulat” dan memiliki otonomi SDA secara penuh/mandiri, namun tanpa disertai adanya infrastruktur yang memproteksi eksistensi mereka, pun akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Artinya, memberikan kedaulatan lokal pengelolaan SDA sepenuhnya kepada lokalitas tanpa ada mekanisme proteksi, sama saja membiarkan desa/lokalitas bersaing dengan kekuatan global yang tidak sebanding. Di masa depan, harus tetap diantisipasi batas-batas otorisasi pengelolaan SDA oleh lokalitas. Pengaturan pengelolaan SDA tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan karenanya sistem proteksi tersebut harus dijamin oleh pasal-pasal khusus dalam Undang-Undang Otonomi Desa (yang sedang disusun).

Jika lokalitas asli dengan keseluruhan tatanan pengelolaan SDA-nya telah mampu selama ini memberikan contoh *ketahanan nafkah yang mandiri* bagi keseluruhan kehidupan warganya, maka sudah saatnya desa 2030 berkaca pada sistem-sistem lokal tersebut. Maukah dan mampukah kita berubah seraya tetap mengantisipasi kekuatan global yang tidak bisa dielakkan?

Daftar Rujukan

- Bebbington, A. J., and Batterbury, S. P. J. 2001. Transnational Livelihoods and Landscapes: Political Ecologies of Globalization. *Ecumene*, Vol. 8/4, pp. 369-380.
- Castels, S. 2001. Studying Social Transformation. *International Political Science Review*, Vol. 22/1, pp. 13-32.

- Friedman, J. 1999. Indigenous Struggles and the Discreet Charm of the Bourgeoisie. *Journal of World System Research*, Vol. 2. pp. 391-413.
- Edelman, M and Haugerud, A. 2005. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Blackwell. Malden and Oxford.
- Escobar, A. 1998. Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movement. *Journal of Political Ecology*, Vol. 5, pp. 53-82.
- _____. 1999. After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. *Current Anthropology*, Vol. 40/1, pp. 1-30.
- _____. 2005. Imagining a Post-Development Era *dalam* Edelman, M and Haugerud, A. (eds.) 2005. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Blackwell. Malden and Oxford.
- Fukuyama, F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell university Press. Ithaca. New York.
- Kuswijayanti, E. R. et. al. 2007. Krisis-Krisis *Socio-Politico-Ecology* Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi. *Sodality: Journal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia Vol 1/1*, pp. 1-20.
- Naingolan, R. 2007. Teladan dari Toro: Harmonis bersama Alam. <http://www.kompas.com> diakses pada Selasa 01.05.2007 pukul 12.00 WIB.
- Nygren, A. 1999. Local Knowledge in the Environment-Development Discourse. *Critique of Anthropology*, Vol. 19/3, pp. 267-288.
- Robinson, W. I. 2001. Social Theory and Globalization: The Rise of Transnational State. *Theory and Society*, Vol. 30, pp. 157-200.
- Rondinelli, D. A. and Cheema, G. S. 2003. Reinventing Government for the Twenty-First Century: State Capacity in a Globalizing Society. Kumarian Press. Bloomfield.
- Silitoe, P. 1998. The Development of Indigenous Knowledge: A New Applied Anthropology. *Current Anthropology*, Vol. 39/2, pp. 223-252.
- Winter, M. 2003. Embeddedness, The New Food Economy and Defensive Localism. *Journal of Rural Studies*, Vol. 19/1, pp. 23-32.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perusahaan TNCs Terbesar di Dunia yang Diranking Berdasarkan Jumlah Assets di Luar Negeri dan Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap di Seluruh Dunia (dibatasi khusus Bidang Bioteknologi-Pertanian) Tahun 2002

Ranking 2002		Ranking 2001		Nama Perusahaan TNCs	Negara Asal TNCs	Jenis Industri	Jumlah Asset di Luar Negeri (juta US dollar)	Jumlah Asset Total (juta US dollar)	Nilai Penjualan di Luar Negeri (juta USD)	Total Nilai Penjualan (juta USD)	Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri (orang)	Jumlah Total Tenaga Kerja (orang)
Asset di Luar Negeri	TNI	Asset di Luar Negeri	TNI									
26	48	21	20	NSA	Switss	Pangan	36.145	63.007	34.870	57.508	150.232	254.199
36	42	25	35	ULV	Inggris	Pangan, Pertanian, Obat-obatan	27.937	46.752	27.614	46.122	193.000	258.000
38	34	-	-	Nvrt	Swiss	Obat-obatan	25.874	45.588	20.588	20.906	40.282	72.877
39	39	33	40	Avts SA	Perancis	Obat-obatan	23.753	32.574	14.767	19.506	37.802	78.099
44	57	40	54	Bsf AG	Jerman	Kimia	22.694	36.781	17.878	30.473	39.078	89.398
49	68	52	68	Pfz Inc	USA	Obat-obatan	21.161	46.356	11.611	32.373	72.000	120.000
52	59	58	73	Prt & Gmb	USA	Obat-obatan dan Kimia	20.282	43.706	21.524	43.377	61.200	98.000
54	36	43	29	Glx-Sm-Kln Plc	Inggris	Obat-obatan	19.992	35.821	29.320	31.899	58.471	104.499
59	75	42	58	Byr AG	Jerman	Obat-obatan dan Kimia	17.597	43.706	14.923	28.021	52.000	122.600
64	61	73	66	Dw Chem Co	USA	Kimia	17.386	39.562	16.350	27.609	24.725	49.959
72	15	78	14	Astrznc Plc	Inggris	Obat-obatan	14.796	21.576	16.969	17.841	46.800	57.500
80	81	69	78	D Pnt (E.l.) de Nmrs	USA	Kimia	13.040	34.621	12.584	24.006	29.755	79.000
83	91	88	84	J & J	USA	Obat-obatan	12.814	40.556	13.843	36.298	34.218	108.300
92	96	90	92	Mrck & Co	USA	Obat-obatan	11.388	47.561	8.300	51.800	28.600	77.300
96	79	93	80	Abb Lab	USA	Obat-obatan	11.073	24.259	6.687	17.685	33.000	71.819

Source: UNCTAD/Erasmus University Database, 2004.

TNI = Trans National Index